

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andrian Sutedi, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Sinar Grafika.

Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Public (Konsep, Dimensi, Indicator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta.

Miranda, Eka, dan Julistar, 2010, *Analisis dan desain data warehouse pada pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-government procurement)*, Binus University, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

S. Tangkilisan, Hessel Nogi, 2005, *Manajemen Publik*. Grasindo: Jakarta.

Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Jurnal:

Darmawan Napitupulu, “Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Kota Bogor”, *Jurnal Sisfo*, Vol 5, Maret 2015.

Harziani, “Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 13, No 1, (2017).

Isnandar, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 5, No 2, (2017).

Ita Akyuna, Djoko, “Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E Procurement”, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol 13, No 2, (2009).

Kodar Udoyono, “E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas Kota Yogyakarta”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol 3, No 1, (2012).

Listiyanto, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.1, No.1, (2012).

Masvika, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontraktor dalam Melakukan Penawaran pada Lelang Sistem E-Procurement”, *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, Vol 10, No 1, (2015).

Mokoginta, “Analisis Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Kotamobagu”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol 8, No 2, (2017).

Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.24, No.2, (2017).

Nurchana Arum Rossita Arindra dkk, “Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.2, (2014).

Nurlisa Arfani, “Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa dengan *E-Catalogue*”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.1, Oktober 2015.

Puspa Malinda, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Peserta Tender dalam Tender dengan sistem E-Procurement”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 2, No.6, (2017).

Shafriza Bima Wikiyantasa, “Analisis Teks pada Aanwizing”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.1, 2 Oktober 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[R.I., Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah](#)

[R.I., Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah](#)

[R.I., Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.](#)

[Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.](#)

[Inpres 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.](#)

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Tahun 2011.

Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Internet:

Soeman Hasiboen, “Metode Pengadaan Barang dan Jasa”,
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode_pemilihan_\(pengadaan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode_pemilihan_(pengadaan)),
diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.

Shanti Rachmadsyah, “Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ca00201c4a80/peraturan-pengadaan-barang-dan-jasa>, diakses pada tanggal 25 Februari
2018 Pukul 09.00 WIB.

Ilham Wahid, “Beberapa Catatan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015”,[http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attac
hments/BEBERAPA_CATATAN_ATAS_PERATURAN_PRESID
EN_NO.4_TAHUN_2015.pdf](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/BEBERAPA_CATATAN_ATAS_PERATURAN_PRESIDEN_NO.4_TAHUN_2015.pdf)/ diakses pada tanggal 27 Februari 2018
pukul 05.00 WIB.

Humas, “Inilah Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-162018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah/> diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 11.30 WIB.

Admin, “Dokumen LPSE Kota Yogyakarta”, <https://lpsekotajogja.wordpress.com/dokumen/> diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 14.20 WIB.

Abu Saman, “Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/13406-aspek-hukum-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 9.30 WIB.

LKPP, “Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Publik”, <http://dityalab.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-pengadaan-barangjasapublik.html>), diakses pada tanggal 13 November 2015.